

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI  
KECAMATAN TANETE RIATTANG OLEH DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN**

MUH. ZAID YUSUF

NPP. 30.1204

*Asdaf Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: [muhzaidyusuf8@gmail.com](mailto:muhzaidyusuf8@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmilia, S.Sos, M.A

**ABSTRACT**

**Problem Statement:** Legislation No. 18 of 2008 regarding waste management which has the aim of reducing problems regarding waste in Indonesia, our country needs to implement a change in the pattern of conventional waste management to become waste management that focuses on reducing and handling waste. This is commensurate with the Bone Regency Regional Regulation Number 4 of 2017 Concerning Healthy Regency Administrators, in the regulation explaining that to improve the implementation of healthy districts requires physical, social quality, changes in people's attitudes with the active role of the local government in a directed, coordinated, integrated and sustainable.

**Purpose:** This study aims to analyze and obtain how the Implementation of Waste Management Policy by the Environment Agency in Bone Regency, South Sulawesi Province, the inhibiting factors and the Government's efforts to overcome obstacles. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative method. This study uses implementation theory from Van Meter and Van Horn. **Results:** The results of the research on the implementation of waste management policies in Tanete Riattang District by the Bone Regency Environmental Service have been carried out properly according to the factors measured in the implementation theory of Van Meter and Van Horn. In addition to the supporting factors in its implementation, inhibiting factors were also found in the implementation of this waste management policy. This made the Bone Regency Government make efforts to improve the implementation of this policy for the better. **Conclusion:** Even though the implementation of the waste management policy in Tanete Riattang District, Bone Regency has been carried out well, there are still obstacles in its implementation, namely the lack of budget provided and the lack of public awareness regarding good and correct waste management.

**Keywords:** Implementation, Garbage, Bone District

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah yang memiliki tujuan untuk mengurangi permasalahan mengenai sampah yang ada di Indonesia, negara kita perlu menerapkan perubahan pola pengelolaan sampah konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Hal tersebut sepadan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Kabupaten Sehat, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan kabupaten sehat diperlukan adanya kualitas fisik, sosial, perubahan sikap masyarakat dengan adanya peran aktif dari pihak pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, faktor penghambat serta upaya Pemerintah untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tanete Riattang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan faktor yang diukur dalam teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Selain adanya faktor pendukung dalam pelaksanaannya, masih juga ditemukan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Bone melakukan upaya dalam meningkatkan implementasi kebijakan ini menjadi lebih baik. **Kesimpulan:** Meskipun implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala yaitu minimnya anggaran yang disediakan dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.

**Kata Kunci:** Implementasi, Sampah, Kabupaten Bone

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2008 membahas mengenai pengelolaan sampah yang memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi permasalahan mengenai sampah yang ada di Indonesia, serta menekankan kepada seluruh masyarakat bahwasanya, negara kita perlu menerapkan perubahan pola pengelolaan sampah

konvensional menjadi pengelolaan sampah yang bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah.

Kehidupan manusia sehari-hari tidak lepas dari kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, itu baik dalam skala kecil maupun skala besar. Memproduksi sampah dalam kegiatan sehari-hari menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2021) Kabupaten Bone, jumlah penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2021, yaitu sebanyak 801.775 Jiwa. Terkhusus pada Kecamatan Tanete Riattang yang jumlah penduduknya kurang lebih 53.335 jiwa. Dari pernyataan tersebut kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tergolong tinggi. Hal tersebut berpengaruh pada jumlah timbulan sampah di Kabupaten Bone.

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Jumlah timbulan sampah dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, dengan jumlah rata-rata 33,33%. Hal ini menyatakan bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk maka volume produksi sampah juga meningkat sehingga terjadi penumpukan sampah. Konsep pengelolaan sampah di Kabupaten Bone dapat dikatakan masih tergolong sangat tradisional, sistemnya yaitu dikumpulkan terlebih dahulu, di angkut lalu di buang. Sistem ini masih menjadi tradisi di kalangan masyarakat di Kabupaten Bone, dikarenakan minimnya pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Berdasarkan data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone 2018-2023, 60% persentase sampah yang tak tertangani, sementara itu jumlah sampah yang berkurang dari pengelolaan rata-rata sebesar 17,5 ton/tahun dari total sampah sebanyak 281.770,75 ton/tahun. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah produksi sampah yang dihasilkan dan yang dikurangi. Penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan luas 4.559,00 km<sup>2</sup>, kapasitas total jumlah penduduk 801.775 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 267 orang tentu hal itu tidak sebanding.

Di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pengelolaan sampah di TPA "MABESSA" masih menggunakan sistem semi *open dumping*. Sistem 3R dalam pengelolaan sampah di level masyarakat namun sistem *reduce, reuse dan recycle* ini dijadikan sebagai program konvensional yang masih menggunakan cara timbun, angkut, dan buang.

Penanganan sampah yang belum *maximal* dan optimal merupakan latar belakang kelembagaan pengelolaan sampah, disisi lain terdapat potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat atau penduduk yang belum kembangkan, dengan pengetahuan masyarakat tentang cara

pengelolaan sampah yang masih tergolong sangat minim disebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat melalui sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang baik, dan kurangnya asumsi yang kuat untuk mendorong keinginan masyarakat menjaga kebersihan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elena (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Labukkang Kota Pare-pare, hasil dalam Penelitian ini diterima sudah jelas dan dapat dimengerti oleh implementor serta staff yang ada sudah dibagi berdasarkan tugasnya masing-masing, informasi yang diterima di Kelurahan Labukkang juga sudah tertera dalam Surat Edaran Walikota No. 21, Kelurahan Labukkang juga memiliki wewenang untuk mengelola sampah, dan fasilitas yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh tim pengelola; Maulidyka A. Sudrajat (2017) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Manado, hasil dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan, pemerintah kota Manado telah melaksanakan kewajibannya. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dalam melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Namun, kesadaran buang sampah pada tempatnya masih sangat kurang dilakukan oleh masyarakat; Paramitha Adhinul Putra (2016) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, hasil dalam penelitian ini yaitu Dari aspek aplikasi, dinas PU dan perhubungan perlu membuat wadah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang sesuai standar menurut UUD Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dari ketiga penelitian diatas, memiliki persamaan pembahasan yaitu terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah yang ada di tiap-tiap daerahnya. Namun, terdapat perbedaan yaitu terkait dengan pembahasan yang diberikan pada penelitian sebelumnya, berbeda dengan yang ingin penulis kaji yaitu secara khusus membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu mulai dari lokus dan konteks penelitian yang dilakukan khususnya yang ada dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn. Dimana nantinya penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Bone khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone lebih optimal lagi.

## 1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, mengetahui dan menganalisis hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, serta mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk dapat menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan fokus yang diamati. penulis menyimpulkan bahwa dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dipilih sangat tepat untuk digunakan dalam penulisan yang akan penulis lakukan. Hal ini juga dikarenakan metode dan pendekatan yang dipilih cukup representatif dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketiga sumber data (*person, place, paper*) diatas untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dalam menentukan informan untuk mendapatkan data dari wawancara.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang telah didapatkan peneliti selama melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, sebagaimana rumusan masalah dalam skripsi ini telah diuraikan sebagai berikut :

### 3.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanete Riattang Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan temuan yang didapatkan dan hasil wawancara serta kunjungan peneliti, menghubungkan dengan konsep implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Matter dan Van Horn dimana terdapat 6 variabel dari implementasi kebijakan yakni Tujuan dan ukuran kebijakan; Sumberdaya; Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antarorganisasi; Karakteristik Agen Pelaksana; Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik; dan Disposisi Implementor. Penjelasannya antara lain :

### **A. Tujuan dan Ukuran Kebijakan**

Keberhasilan Implementasi kebijakan dapat diukur bila ukuran keberhasilan tersebut dapat disandingkan dengan kondisi riil masyarakat dan sejauh mana masyarakat dapat menjangkau kondisi ideal dari target sebuah program kebijakan. Dengan kata lain, pemerintah harus membuat indikator keberhasilan dari sebuah program yang dicanangkan. Terkait dengan suatu kebijakan pengelolaan sampah yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat, Pemerintah Daerah perlu menunjukkan indikator keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten sehat, diantaranya upaya teknis untuk pengelolaan sampah.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone belum mencapai target keberhasilan dikarenakan belum mencapai indikator yang telah ditetapkan sehingga Pemerintah Kabupaten Bone perlu berusaha lebih keras untuk mencapai target keberhasilan penanganan masalah sampah di Kabupaten Bone.

### **B. Sumber Daya**

Sumber daya mempunyai peran penting terhadap implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak hanya sumber daya manusia saja yang diperhatikan, akan tetapi terdapat sumber daya – sumber daya lain yang perlu diperhatikan yakni sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu harus diperhitungkan di implementasi kebijakan.

Bila dihubungkan dengan konsep implementasi dari Van Meter dan Van Horn, terlihat jelas bahwa Kantor Kecamatan Tanete Riattang Pemerintah Daerah Kabupaten Bone telah mengalokasi dukungan sumber daya finansial berupa anggaran untuk pengelolaan sampah walaupun dalam jumlah yang terbatas dengan mempertimbangkan adanya prioritas lainnya yang harus diperhatikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran Pemerintah Kabupaten Bone.

### **C. Aktivitas Pelaksanaan dan Komunikasi Antar Organisasi**

Pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone telah mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan sampah organik untuk kemudian di tindak lanjuti oleh Kelurahan dalam bentuk sosialisasi kepada warga masyarakat untuk ikut mendukung upaya pengelolaan sampah. Terkait konsep Implementasi kebijakan, pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan dapat diwujudkan dengan adanya sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat,

maka komunikasi sebagai bentuk koordinasi dapat diwujudkan guna mendekatkan pada tercapainya target implementasi kebijakan. Begitu juga sebaliknya, jika sosialisasi yang dilakukn akurang optimal kepada masyarakat, maka implementasi kebijakan tidak mencapai target capaian program.

#### **D. Karakteristik Agen Pelaksana**

Agen pelaksana pada penelitian ini adalah para birokrat yang berwenang menjalankan program pengelolaan sampah di lingkungan kecamatan Tanete Riattang yang terdiri dari Camat, Lurah, aparatur pemerintah daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Bone. Agen pelaksana tidak dapat menjalankan program dimaksud bila tidak adanya dukungan dari masyarakat.

Agen pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sudah sesuai dengan luas cakupannya. Selain itu fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk fisik sudah disediakan di beberapa wilayah atau tempat.

#### **E. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Dimensi penting yang juga harus diperhatikan dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Van Matter dan Van Horn adalah sejauh mana kondisi eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik sudah ditetapkan. Kondisi eksternal tersebut diantaranya adalah kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kendala dalam merealisasikan kebijakan dan tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam pengimplementasian kebijakan publik juga harus memperhatikan kondisi eksternal.

Pada dimensi ini dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi, sosial, dan politik sangat mempengaruhi terlebih terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Secara umum kondisi ekonomi, sosial, dan politik mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang. Akan tetapi di sisi lain masih banyak kekurangan yang harus dibenahi atau ditingkatkan lagi.

#### **F. Dimensi Implementator**

Sikap penerimaan dan penolakan kebijakan dari suatu pelaksana implementasi kebijakan ialah suatu hal penting karena hal itu dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang ada. Ini terjadi karena kebijakan yang implementor laksanakan merupakan kebijakan *top down* (dari atas), dan bukanlah hasil dari formulasi masyarakat yang mengenal betul persoalan yang benar.

Sikap/kecenderungan para pelaksana kebijakan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Bone secara umum menunjukkan sikap menerima kebijakan tersebut. Ditunjukkan dengan dibuatnya Peraturan Daerah. Proses pelaksanaan yang berjalan dan terlaksana sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tanete Riattang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan**

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang menyokong, membantu, dan menunjang dalam pengimplementasian suatu kebijakan atau program sebagai acuan agar kebijakan atau program tersebut dapat terus dijalankan dengan baik.

Terdapat faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yaitu dengan tersedianya fasilitas untuk mendukung terjadinya lingkungan yang sehat dan bersih, serta dukungan dan *support* masyarakat yang akan kegiatan ini.

Faktor penghambat ialah faktor yang tidak diharapkan terjadi dalam pencapaian implementasi suatu kebijakan atau program dan dapat memperlambat jalannya kebijakan atau program tersebut. Bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone, antara lain:

1. Minimnya anggaran yang disediakan
2. Minimnya kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar.

### **3.3 Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Tanette Riattang Kabupaten Bone**

#### **A. Upaya dalam Mengatasi Masyarakat**

Kebijakan itu memiliki kekurangan atau kelemahan, hal tersebut menjadi tantangan dari dinas terkait untuk bagaimana cara mengatasi kelemahan itu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone berupaya agar program terus berjalan, sesuai dari kelemahan yang penulis sebutkan yakni kurangnya kesadaran atau respon masyarakat mengenai sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pengelolaan sampah

ini selain membuat lingkungan menjadi bersih ini juga menjadi ladang pahala guna di kehidupan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mengatasi kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat yakni dengan cara melakukan sosialisasi mengenai dampak positif dari pengelolaan sampah.

## **B. Upaya dalam Mengatasi Dinas Lingkungan Hidup**

Pengelolaan sampah sebuah program yang memiliki banyak sekali manfaat apabila dapat dikelola dengan baik. Namun, jika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone tidak dapat mempersiapkan serta mengelola dengan baik maka program ini hanya akan menjadi beban bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone telah melakukan upaya untuk melanjutkan program gerakan berkah sampah agar tetap berjalan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone adalah menyusun program kompak S'kali bersama KSM atau jumpa berlian didalam rencana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone agar kedepannya program ini tetap berjalan serta menjadi prioritas program di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.

Satu-satunya upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, yakni memasukkan program ini kedalam rencana strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone pada masa jabatan kepala dinas yang baru ini.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini masih ditemukan beberapa faktor penghambat yang membuat belum terlaksananya secara optimal kebijakan pengelolaan ini khususnya di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang secara umum sudah berjalan dengan baik, walaupun terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan ditingkatkan. Berdasarkan dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, dikatakan belum berhasil dikarenakan belum mencapai indikator-indikator yang diinginkan sehingga

pemerintah di Kabupaten Bone berusaha mencapai target dengan melakukan berbagai giat untuk tercapainya indikator tersebut, Serta, berdasarkan segi disposisi implementor, secara umum menunjukkan sikap menerima dan berupaya mendukung kebijakan tersebut.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yaitu dengan tersedianya fasilitas untuk mendukung terjadinya lingkungan yang sehat dan bersih, serta dukungan dan support masyarakat yang akan kegiatan ini. Adapun faktor yang menghambat, yaitu kurangnya anggaran yang disediakan, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.
3. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peduli terhadap lingkungan hidup guna menjadikan lingkungan menjadi lebih asri, sehat dan bebas dari sampah.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini hanya sebagai model studi kasus.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Artati, H. K. 2018. *Berkah Sampah*. Yogyakarta: Deepublish
- Auliya, N. H. 2020. *Metode Penulisan Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penulisan Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D.J., & Huraerah, Abu. 2019. *Kebijakan Perlindungan Sosial*. Bandung: Nuansa
- Cendekia Ilmar, A. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi*
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta Pasolong,
- H. 2005. *Metode Penulisan Administrasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas).
- Riduan, A. 2021. *Penanganan & Pengelolaan Sampah*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani
- Sidiq, U dan C,M, Miftahul. 2019. *Metode Penulisan Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya
- Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penulisan Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metodologi Penulisan Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta
- Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Penerbit
- Sugiyono. 2008. *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penulisan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2019. *Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Suprihatini. 2017. *Metode Penulisan Kualitatif (Edisi ke-3)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penulisan Gabungan*. Jakarta: Kencana.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  
 Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah RumahTangga dan Sejenis Rumah Tangga  
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah  
 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 152 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

### Sumber Bacaan Internet dan Sumber Lainnya

- Atmasari, A. (2022). *Jangan Anggap Remeh, Berikut ini Ciri-ciri, Penyebab, dan Cara Mencegah Stunting pada Anak*. Diakses pada 6 September 2022. Tersedia di: <https://kehamilansehat.com/id/ciri-ciri-dan-penyebab-stunting-pada-anak/>
- Daerah, D. B. P. (2021). *Monitoring Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi*. Diakses pada 6 September 2022. Tersedia di: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/3>
- Foundation, P. (2021). *Kesehatan Masyarakat*. Diakses pada 4 September 2022. Tersedia di: <https://penabulufoundation.org/kesehatan-masyarakat/>
- Jatim Newsroom. (2022). *Gubernur Jatim : Penanganan Stunting Harus Dari Masa Remaja*. Diakses pada 4 September 2022. Tersedia di: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-penanganan-stunting-harus-dari-masa-remaja>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Stunting Balita Indonesia Masih di Atas 24% pada 2021*. Diakses pada 3 September 2022. Tersedia di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/08/stunting-balita-indonesia-masih-di-atas-24-pada-2021#:~:text=Berdasarkan hasil Studi Status Gizi,diperkirakan mencapai 26%2C9%25>
- Litbangkes, H. (2021). *Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Diakses pada 3 September 2022. Tersedia di: <https://www.litbang.kemkes.go.id/buku-saku-hasil-studi-status-gizi-indonesia-ssgi-tahun-2021/>